



Pemprov Didesak Evaluasi Tapal Batas Pontianak-Kubu Raya

PONTIANAK - DPRD Kalbar memberikan masukan terhadap Raperda Nota Keuangan APBD tahun 2025. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, kemarin.

Juru Fraksi Golkar, Suma Jenny Heryanti mengungkapkan, KUA-PPAS yang sudah ditandatangani kesepakatan bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD, digambarkan bahwa APBD 2024 secara singkat dengan porsi pendapatan Rp5.817.459.220.795. Sementara alokasi be-



lanja ditargetkan sebesar Rp5.967.459.220.795.

Fraksi Golkar Kalbar berharap penyusunan APBD 2025, penjabat gubernur akan mengakhiri masa jabatannya seiring terpilihnya gubernur dan wakil gubernur 2024-2029.

"Kita harus bisa menjaga yang baik dalam mengaplikasikannya sebagai program pembangunan yang berkelanjutan dengan pedoman pada rencana pembangunan nasional," ucapnya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Sambungan dari halaman 9

Dia berharap penyusunan APBD 2025 dapat menjaga keseimbangan yang baik dalam mengaplikasikan program pembangunan berkelanjutan. "Setiap dana yang dianggarkan dalam program pembangunan harus terukur jelas indikator kinerjanya," ujar Suma.

Fraksi Golkar berharap agar kebijakan yang dituangkan dalam APBD 2025 dapat menjawab persoalan aktual yang ada secara berkesinambungan. Tak hanya itu, melalui RAPBD ini juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalbar.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yosep Alexander sepakat agar raperda tersebut dapat dilan-

jutkan pembahasannya dengan beberapa catatan dan masukan.

Di antaranya agar pembahasan itu dilakukan secara transparan, akuntabel baik dari sisi pendapatan maupun belanja, sehingga hasil akhir pembahasan APBD tidak berbeda dengan yang dibahas oleh TAPD dengan badan anggaran.

"Kami mengimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terutama dalam hal pemerataan pembangunan sekolah yang jauh dari kota, terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas proses belajar sehingga siswa di daerah dapat bersaing dengan siswa sekolah menengah atas yang ada di kota," ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar

alokasi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan secara merata di seluruh Kalbar. "Pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Menurut Yosep laju pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur termasuk di antaranya transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energy. "Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," paparnya.

Sementara dari Fraksi Gerindra mempertanyakan berapa besar dividen yang didapat oleh pihak PT. Jamkrida. Fraksi ini meminta Pemprov Kal-

bar untuk dapat mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan Sultan Hamid 2 di sekitar persimpangan Tanjung Raya 1 dan Tanjung Raya 2.

"Mohon untuk jalan tersebut dilakukan pelebaran jalan untuk mengatasi kemacetan," ujar jurib fraksi.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga meminta ke Pemprov Kalbar mengevaluasi kembali tapal batas antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya khususnya di Perum 4 Star Borneo yang menjadi permasalahan status kependudukannya.

Sebab sampai sekarang penduduknya memegang KTP Kota Pontianak tetapi tidak bisa digunakan untuk bertransaksi dalam hal administrasi yang sangat merugikan masyarakat Perum. (den)